



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU
DALAM HUKUM PASAR
MODAL INDONESIA**

SKRIPSI



**LUSY RAHMAWATI
07 140 003**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DALAM HUKUM PASAR
MODAL INDONESIA**

(Lusy Rahmawati, 07140003, Fakultas Hukum UNAND, 69 Halaman, 2011)

ABSTRAK

Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya terdiri dari saham yang disetorkan oleh pemiliknya. Besarnya saham yang disetorkan oleh masing-masing pihak berbeda-beda. Perbedaan ini yang menimbulkan adanya tingkatan dalam kepemilikan saham. Pemegang saham independen merupakan pemegang saham minoritas sering kali diabaikan oleh pihak lain seperti pemegang saham utama (mayoritas), direksi dan dewan komisaris, apalagi perusahaan tersebut sudah go publik, pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dewan komisaris bisa melakukan benturan kepentingan transaksi yang bertujuan untuk menguntungkan diri pribadi, merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas. Benturan Kepentingan Transaksi adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama. Tujuan utama adanya perlindungan ini adalah untuk melindungi pemegang saham minoritas terhadap kesewenangan direksi, komisaris dan pemegang saham utama. Benturan kepentingan yang dimaksud adalah adanya kepentingan ekonomis pribadi yang didahulukan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham utama dari suatu perusahaan yang mana transaksi atau aktivitas tersebut dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham minoritas/ independen. Seperti kegiatan atau transaksi yang dilakukan ketika direksi hendak melakukan penjualan saham perusahaan, direksi dapat saja dengan kewenangan yang dia miliki menjual harga saham tersebut dengan harga yang premium, sehingga menyebabkan pihak lain tidak jadi membeli saham perusahaan tersebut, jika saham tersebut dijual kemungkinan perusahaan yang akan membeli saham tersebut akan mengganti posisi kemanajemenan perusahaan yang dapat menjatuhkan direksi, sehingga untuk menjaga agar direksi tersebut tetap aman posisinya, maka direksi dapat melakukan kegiatan menjual saham dengan harga yang premium Adapun yang dibahas yaitu: bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam hukum pasar modal Indonesia, Peranan BAPEPAM dalam memberikan perlindungan serta tanggung jawab pengurus dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis normatif dimana sumber data primer berupa data kepustakaan. Hasil studi kepustakaan ini didasarkan atas peraturan yang menjadi landasan permasalahan ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlunya peningkatan dan peran BAPEPAM yang lebih untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi serta kesadaran atas peraturan dari masing-masing pihak. Serta perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap penegakan hukum oleh BAPEPAM dalam hal benturan kepentingan transaksi tertentu. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peraturan yang lebih rinci serta peraturan yang lebih tegas dari BAPEPAM mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi tersebut.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA**”, untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Shalawat beriringan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah ilmu pengetahuan bagi umat manusia.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak akan mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis. Papa (Edwar) dan Mama tercinta (Wisserni) atas segala cinta, doa, dan pengorbanan di setiap tetesan keringat yang telah dikeluarkan untuk kesuksesan penulis, pengorbananmu melebihi segalanya, semoga secuil karya ini dapat kalian banggakan.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Yossierwan, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenaddin Adegustara, S.H.,M,S. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III.
3. Bapak Syahrial Razak S.H.,M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Perdata Universitas Andalas.

4. Ibu Dr.Yulfasni, S.H.,M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Zulkifli, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan petunjuk serta nasehat yang sangat berguna untuk hasil terbaik bagi penulisan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan staf biro Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Uda ku, Hengki Ferdiawan, Hendra Kurniawan dan adik ku, Angga Eka Putra, atas semua dorongan disaat penulis kesulitan menyelesaikan skripsi ini. Kepada Handi Yanuar, terima kasih atas segala bimbingan dan kesetiaanya memberikan dukungan moril maupun materil
7. Sahabat-sahabat ku, Icha, Visca, Ucy, Putri, teman dan kakak terbaikku, Dini, Dina, Dina Kecil, Nana. Teman-teman Apartemen Bunda, Anen,Ira, Dya, Yanti, Yulia, Wira, Nita. terima kasih untuk semua kenangan hidup kita, masa-masa yang kelak akan kita ceritakan untuk anak cucu kita.
8. Teman- teman Hukum 07 terutama lokal 1 yang sama –sama berjuang menggapai gelar sarjana hukum dan teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima Kasih untuk masa-masa kuliah yang menyenangkan
9. Anggota Milanisti Indonesia terutama Sezione Padang, terima kasih atas kepeduliannya di saat penulis merasa jatuh.

Akhirnya penulis menyadari, tulisan ini masih banyak kekurangan, dan jauh dari kesempurnaan, penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas.....	12
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	12
2. Organ-organ Perseroan Terbatas.....	14
3. Modal dan saham pada Perseroan Terbatas.....	23
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	27
C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal.....	28
1. Pengertian dan Pengaturan Pasar Modal Indonesia.....	30
2. Pihak – pihak yang Terkait dalam Pasar Modal Indonesia.....	31
3. Instrumen Pasar Modal Indonesia.....	34

4. Penawaran Umum di Pasar Modal.....	37
5. Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal.....	40
D. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dalam Pasar Modal Indonesia dan Dasar Hukumnya.....	44
E. Tinjauan umum tentang Badan Pengawas Pasar Modal.....	46

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam pasar modal Indonesia.....	50
B. Peranan BAPEPAM terhadap perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam pasar modal Indonesia.....	56
C. Tanggung Jawab Pengurus (Direksi dan Komisaris) Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Dalam hukum Pasar Modal Indonesia.....	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Setiap hari manusia selalu bersinggungan dengan kegiatan ekonomi, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan maupun untuk mata pencaharian. Salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan adalah mendirikan kegiatan usaha, dan salah satu badan usaha yang biasa dipakai dalam dunia usaha di Indonesia adalah perseroan terbatas.¹

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT merupakan suatu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan modalnya yang terdiri dari saham-saham dan memiliki kriteria tertentu yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal suatu perusahaan yang akan mencari dana tambahan dari masyarakat melalui pasar modal maka perusahaan tersebut harus melakukan suatu proses *going Public* atau *go public*.²

Perusahaan yang melakukan penawaran umum dan melakukan perdagangan saham di bursa efek berarti ada bagian dari kepemilikan saham perusahaan tersebut di miliki oleh masyarakat. Dengan adanya perusahaan tersebut *Go Public*,

¹Indra surya dan Ivan Yustiavanda, *penerapan good corporate governance*, cet 1, kencana prenada Media Grup, 2006 hal 1.

² Yulfasni, *hukum pasarmodal*, Jakarta. Badan Penerbit Iblam, 2005, hlm.30.

maka perusahaan tersebut akan mudah untuk mendapatkan dana dan lebih kompetitif dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perusahaan yang dapat melakukan kegiatan penawaran umum tidaklah semua perusahaan, akan tetapi perusahaan yang dapat melakukannya adalah perusahaan terbuka menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, Perusahaan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk dari kegiatan usaha tak jarang juga mengalami masalah-masalah yang nantinya dapat merusak dari kegiatan perseroan terbatas itu sendiri dan dapat juga mempengaruhi kegiatan perekonomian,

Penyetoran modal oleh para pemilik modal tidaklah sama, tergantung kepada banyaknya modal yang mereka punya. Modal yang disetorkan oleh pemilik modal kepada perusahaan dinamakan dengan saham. Saham memberikan hak kepada pemiliknya.³

Beberapa hak yang diberikan kepada para pemilik saham yaitu:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- c. Menjalankan hak lainnya.

Tidak samanya jumlah saham yang ditanamkan para pemiliknya terhadap perusahaan mengakibatkan terbaginya para pemegang saham tadi atas kaum mayoritas dan kaum minoritas. Pemegang saham minoritas adalah pihak

³ Pasal 52 angka 1 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

pemegang saham yang memiliki sedikit saham dalam perusahaan, biasanya kaum minoritas ini tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan baik sebagai direksi maupun sebagai komisaris. Meskipun demikian pihak pemegang saham minoritas tetap memiliki hak dalam perusahaan sesuai dengan saham yang mereka tanamkan, namun pihak perusahaan sering memandang sebelah mata pihak minoritas dan mengabaikan hak pemegang saham minoritas sehingga kepentingan mereka tidak terpenuhi.

Kepemilikan saham seseorang di dalam suatu perseroan sangat berarti penting, hal ini di karenakan saham merupakan bukti keikutsertaan seseorang dalam perusahaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemilik saham. kepemilikan saham seseorang dalam perusahaan tertentu dapat juga berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam perusahaan.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas pada Perseroan Terbatas di dalam pasar modal terdapat dalam dua hal, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan ini telah termaktub di dalam Undang-undang Perseroan terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) dan Undang-Undang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM). UUPT 2007 mengatur hak-hak pemegang saham minoritas yang berupa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak appraisal⁴, akan tetapi dalam ketentuan-ketentuan tersebut belum cukup melindungi kepentingan pemegang

⁴ Hak appraisal, atau yang sering disebut dengan istilah *dissenters right* atau *right of dissent*, yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai (*appraise*) pada harga yang pantas.

(http://usupress.usu.ac.id/files/PerlindunganHukum_Normal)

saham minoritas karena adanya kekuasaan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas untuk memonopoli jalannya perusahaan. Dalam ketentuan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan perbuatan curang dalam penjualan saham dan merugikan investor, karena UUPM 1995 dianggap masih tidak cukup terperinci. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, agar tercapai penyelesaian yang adil. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat (6) UUPT 2007 bahwa gugatan bagi pihak yang dirugikan harus mewakili sekurang-kurangnya 10% saham perseroan yang telah dikeluarkan. UUPM 1995 pun mengatur perlindungan hukum represif di dalam pasal 111 yaitu hak untuk melakukan gugatan bagi pihak yang dirugikan dengan tidak dibatasi besarnya jumlah penggugat

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada pasal 82, dinyatakan bahwa terhadap pemegang saham minoritas diberikan perlindungan terkait dengan hal transaksi benturan kepentingan, dimana disebutkan bahwa BAPEPAM dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan pemegang saham independen untuk melakukan transaksi benturan kepentingan, Namun dalam kenyataannya, hal ini tidak terjadi, pemegang saham minoritas sering dianggap tidak ada dan tidak didengar suaranya.

Benturan Kepentingan Transaksi adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama perusahaan atau pihak terafiliasi dari direktur, komisaris, atau pemegang saham utama. Tujuan utama adanya perlindungan ini adalah untuk

melindungi pemegang saham minoritas terhadap kesewenangan direksi, komisaris dan pemegang saham utama.

Benturan kepentingan yang dimaksud adalah adanya kepentingan ekonomis pribadi yang didahulukan oleh direksi, komisaris atau pemegang saham utama dari suatu perusahaan yang mana transaksi atau aktivitas tersebut dapat merugikan perusahaan atau pemegang saham minoritas/ independen. Seperti kegiatan atau transaksi yang dilakukan ketika direksi hendak melakukan penjualan saham perusahaan, direksi dapat saja dengan kewenangan yang dia miliki menjual harga saham tersebut dengan harga yang premium, sehingga menyebabkan pihak lain tidak jadi membeli saham perusahaan tersebut, jika saham tersebut dijual kemungkinan perusahaan yang akan membeli saham tersebut akan mengganti posisi manajemen perusahaan yang dapat menjatuhkan direksi, sehingga untuk menjaga agar direksi tersebut tetap aman posisinya, maka direksi dapat melakukan kegiatan menjual saham dengan harga yang premium.

Melihat pentingnya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam transaksi benturan kepentingan dalam pasar modal Indonesia untuk meningkatkan kinerja perseroan, maka penulis tertarik membahas masalah tersebut dalam sebuah penelitian dengan judul :” **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU DALAM HUKUM PASAR MODAL INDONESIA**”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam pasar modal indonesia.

1. Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam hukum Pasar Modal indonesia?
2. Apa saja peranan BAPEPAM dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam hukum pasar modal Indonesia?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Pengurus (Direksi dan Komisaris) Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Dalam hukum Pasar Modal Indonesia.

C. TUJUAN PENULISAN

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam hukum Pasar Modal Indonesia?
2. Mengetahui peranan BAPEPAM dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam hukum pasar modal Indonesia?

3. Mengetahui Tanggung Jawab Pengurus (Direksi dan Komisaris) Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Dalam hukum Pasar Modal Indonesia.

D. MANFAAT PENULISAN

Dengan melaksanakan penelitian ini, ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.
 - c. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Perusahaan Publik kepada pemegang saham minoritas
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 - b. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait (perusahaan serta masyarakat) dalam lapangan hukum perdata ekonomi khususnya mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas dalam hal benturan kepentingan transaksi dalam Pasar Modal Indonesia

- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Perusahaan Publik terhadap pemegang saham minoritas.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis Normatif (*normatif legal research*), yaitu pendekatan masalah melalui penelitian dengan melihat norma-norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu cara penelitian yang berusaha menggambarkan suatu keadaan dengan secermat mungkin mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan Publik

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mana terkait dengan proposal penelitian ini, diantaranya:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukumI*, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
4. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
6. Peraturan BAPEPAM
7. Peraturan Pemerintah

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel yang berhubungan dengan Perlindungan hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas baik melalui media internet ataupun media masa.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

1. Teknik pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Yaitu memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tulisan yang akan dibahas.

2. Teknik pengolahan dan analisis data

Data yang telah terkumpul tadi akan dilakukan pengolahan data dengan cara mengumpulkan semua data-data dan dokumen yang telah didapat, kemudian dipilah sesuai dengan permasalahan yang dibahas, kemudian diperiksa kembali

agar tidak terjadi kesalahan dan ketidaklengkapan antara data yang diperoleh dengan permasalahan yang dibahas.

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan penelitian kualitatif yaitu mengetahui dengan mengungkapkan gejala-gejala yang timbul dan diteliti. Dalam analisa kualitatif ini penulis menggunakan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli hukum dan dari hasil penelitian yang penulis lakukan serta pengetahuan yang dimiliki.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar penelitian ini disusun atas beberapa bagian yang semuanya tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang akan digunakan dalam penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini akan menguraikan teori-teori dan konsep-konsep hukum yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur lainnya sebagai sumber pengutipan yang terdiri dari perlindungan bagi pemegang saham minoritas, pengertian saham, pasar modal, perseroan terbatas. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan dibahas tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, bagaimana penerapan perlindungan hukum

bagi pemegang saham minoritas serta bentuk tanggungjawab pengurus dalam memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas atas benturan kepentingan transaksi dalam hukum pasar Modal Indonesia

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari uraian permasalahan secara ringkas disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT, dulunya dikenal dengan istilah *naamloze venotschaap* (NV). Istilah lainnya *corporate limited* (Co.Ltd). Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Pengaturan tentang perseroan terbatas pada awalnya dimuat dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada buku kesatu title ketiga pasal 36 sampai 56, namun pada tanggal 7 Maret 1996 diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas menyebabkan tidak berlakunya lagi ketentuan yang terdapat di dalam KUHD. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dan hukum di Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 2007, Pemerintah Republik Indonesia Mengeluarkan Undang-undang Perseroan Terbatas yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Undang-undang Perseroan Terbatas yang lama yakni undang-undang nomor 1 tahun 1995 menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah “ perseroan terbatas yang selanjutnya disebut dengan perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyatan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya.”

Perseroan terbatas merupakan organisasi bisnis yang memiliki badan hukum yang resmi yang dimiliki minimal oleh dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya.

Berdasarkan ketentuan dari KUHD dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 dapat disimpulkan bahwa PT memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham), dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan.
2. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain.

3. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar dan/atau RUPS.

2. **Organ –Organ Perseroan Terbatas**

Berdasarkan Undang-undang PT pasal 1 ayat 2 dinyatakan organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

A. Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut UUPT pasal 1 ayat 4, Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan / atau Anggaran Dasar.

RUPS adalah suatu wadah dimana para pemegang saham PT berkumpul, sehingga terbentuk suatu organ / lembaga yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan⁶. meskipun kedudukannya sangat penting, tetapi KUHD tidak banyak mengaturnya. Rapat yang dilakukan oleh RUPS ini terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

Menurut Ketentuan Pasal 55 KUHD, RUPS wajib mengadakan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham sekali setahun dalam bulan-bulan tertentu yang tidak lebih enam bulan setelah tahun buku ditutup. Adapun hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham adalah:

⁶ R.T sutantya R.Hadikusuma dan Sumantoro, *pengertian pokok hukum perusahaan*, rajawali pers, 1996. Hlm 67.

- a. Laporan tahunan mengenai jalannya perseroan dari tahun yang lampau, yang disusun oleh direksi dibawah pengawasan dan disetujui oleh dewan komisaris.
- b. Rencana kerja perseroan di tahun yang akan datang
- c. Neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang lalu dan lain-lain yang harus dimintakan persetujuan rapat.
- d. Masalah-masalah lainnya yang diajukan oleh direksi komisaris atau para pemegang saham, dengan jika masalah lain tersebut mengenai perubahan anggaran dasar maka perlu dicantumkan dalam acara rapat, kecuali jika seluruh pemegang saham hadir atau diwakili untuk mendapatkan persetujuan rapat umum tahunan tersebut.

2. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham

Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham ini dapat dilakukan sewaktu-waktu kapan jika dianggap perlu oleh Direksi, Komisaris atau atas permintaan seseorang atau lebih pemegang saham yang diwakili sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan/dikeluarkan oleh perseroan. Jika direksi dalam waktu satu bulan setelah menerima permintaan rapat tidak mengadakan rapat juga, maka yang meminta diadakannya rapat tersebut dapat melakukan panggilan (melalui Pengadilan Negeri) dan menyelenggarakan rapat sendiri atas biaya perseroan, dan rapat demikian ini dapat mengambil keputusan yang sah, asal tidak bertentangan dengan anggaran dasar perseroan.

Setiap pemegang saham mempunyai Hak Bersuara dalam RUPS yang mana ketentuannya diatur dalam pasal 54 (lama) KUHD. Di dalam pasal tersebut dinyatakan Hak Bersuara tersebut adalah:

1. Hak suara para persero (pemegang saham) harus diatur dalam akta pendirian dengan pedoman:
 - a. Apabila modal perseroan terdiri dari seratus buah saham atau lebih, maka tiap-tiap pemegang saham paling banyak mengeluarkan enam suara baginya.
 - b. Bila modal perseroan itu terdiri kurang dari seratus saham, maka tiap-tiap pemegang saham hanya boleh mengeluarkan paling banyak tiga suara.
2. Direksi dan komisaris di dalam pemungutan suara tidak boleh bertindak sebagai pemegang kuasa dari para pemegang saham. Rationya, RUPS itu diadakan justru untuk mengontrol pekerjaan mereka.

Dari dua bunyi ketentuan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 54 (lama) KUHD menganut *Sistem Hak Suara Terbatas*.

A. Wewenang RUPS (pasal 75)

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris yang ditentukan oleh UUPT dan/atau Anggaran dasar.
2. Dalam forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

B. Tempat dan Kedudukan RUPS (Pasal 76)

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasar
2. RUPS perseroan terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan.
3. Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Jika dalam RUPS hadir dan / atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun sesuai dengan ketentuan.

C. Penyelenggaraan RUPS melalui Video Konferensi , Telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS dapat berpartisipasi di dalamnya, sesuai dengan ketentuan UUPT (Pasal 77)

D. Macam-macam RUPS (Pasal 78)

1. RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
2. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
3. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan,
4. RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

E. Pelaksanaan RUPS (pasal 79)

1. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

- a. 1 (satu) organ atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil
- b. Dewan Komisaris.

F. Hak suara tiap saham (Pasal 84)

1. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain
2. Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak berlaku untuk:
 - a. Saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan
 - b. Saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung.
 - c. Saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung telah dimiliki oleh perseroan.

G. Hak suara pemegang saham (pasal 85)

1. Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
2. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
3. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak

berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

4. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
5. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
6. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar.

B. Direksi

Di dalam UUPT Pasal 1 angka 5 dinyatakan Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Pengaturan tentang direksi di dalam UUPT terdapat pada Bab VI Pasal 92 sampai dengan Pasal 107.

1. Persyaratan Direksi

Yang dapat diangkat menjadi direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit

- b. Menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- c. Dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Pengangkatan Anggota Direksi

- a. Direksi diangkat oleh RUPS
- b. Pengangkatan anggota Direksi pertama kali dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian dengan mencantumkan susunan dan nama anggota direksi.
- c. Anggota Direksi diangkat dalam jangka waktu tertentu.

3. Tugas dan Wewenang Direksi

Tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (pasal 92)

4. Kewajiban Direksi

- a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
- b. Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan
- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan (Pasal 100).
- d. Melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/ atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (pasal 101)

5. Pemberhentian Direksi

- a. Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- b. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS (pasal 105).
- c. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- d. Pemberhentian yang dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan
- e. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak berwenang melakukan tugasnya,
- f. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS (pasal 106).

C. Dewan Komisaris

Mengenai Dewan Komisaris di dalam UUPT diatur dalam Bab VI Pasal 108 sampai dengan Pasal 121. Menurut UUPT dalam Pasal 1 angka 6, Dewan Komisaris adalah: organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.

1. Keanggotaan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu tertentu, dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan Dewan Komisaris untuk pertama

kali dilakukan oleh pendiri dalam Akta Pendirian. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) atau lebih anggota.

2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris

Di dalam akta pendirian atau Anggaran Dasar ataupun oleh RUPS seorang Dewan Komisaris mempunyai tugas:

- a. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh Direksi
- b. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan
- c. Memberhentikan sementara waktu anggota Direksi dengan disertai alasan-alasan pemberhentiannya dan wajib memberitahukannya kepada RUPS dalam waktu satu bulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris meliputi 2 hal:

a. *Pengawasan Preventif*

Untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan sebelumnya, yang dapat merugikan perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

b. *Pengawasan Repressif*

Untuk mengontrol tindakan Direksi, apakah semua tindakan yang telah dilakukannya tidak merugikan perseroan ataupun tidak bertentangan dengan akta pendirian / Anggaran Dasar dan Undang-undang, dan apakah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam RUPS telah dijalankannya.⁷

Kewajiban Dewan Komisaris:

1. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya

⁷ *Ibid.* hal 77

2. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan

3. Modal dan Saham Pada Perseroan Terbatas

1. Modal Perseroan Terbatas

Pengaturan mengenai Modal perseroan terdapat dalam Bab III pasal 31 sampai dengan pasal 62 UUPT. Pada Perseroan Terbatas, modal terdiri atas:

a. Modal Dasar

Modal dasar merupakan seluruh modal perseroan, seperti yang ditulis dalam anggaran dasar, baik yang sudah atau yang belum ditempatkan atau disetor. Modal dasar perseroan harus dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Menurut hukum, modal dasar perseroan minimal Rp. 50.000.000,- (Limapuluh juta rupiah)

b. Modal Ditempatkan

Modal ditempatkan adalah sebagian atau seluruh dari modal dasar yang telah diperuntukan atau dijatah kepada pemegang saham tertentu. Jadi pada modal yang ditempatkan tersebut sudah teridentifikasi atas nama siapa saham dan modal tersebut. Menurut ketentuan, jumlah modal yang ditempatkan adalah 25 % (duapuluh lima persen) dari Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

c. Modal setor

Modal setor adalah modal yang telah ditempatkan dan diperuntukan bagi masing- masing pemegang saham dan telah disetor penuh oleh pemegang saham tersebut, sehingga uang penyetoran saham sudah dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha. Menurut ketentuan, jumlah modal disetor adalah 25 % (duapuluh lima persen) dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

2. Saham Perseroan Terbatas

Ketentuan mengenai saham diatur dalam Bab V pasal 48 sampai dengan pasal 62 UUP. Saham merupakan suatu tanda atau bukti keikutsertaan seseorang dalam modal perseroan dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap perseroan.⁸

Di dalam ketentuan KUHD, saham pada PT terdiri atas saham atas nama (op naam) dan saham atas tunjuk (aan toonder). Setiap pemilik saham harus tunduk kepada anggaran dasar PT dan semua keputusan yang telah diambil dengan sah di dalam RUPS. Setiap pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham yang berupa satu surat saham, disertai seperangkat tanda deviden berikut satu talon untuk menerima seperangkat tanda deviden baru.

1. Kepemilikan saham

- a. Saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya
- b. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. (pasal 48)
- c. Pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. (pasal 51)
- d. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya. (pasal 60)

2. Nilai saham

- a. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah

⁸ *ibid* Hal. 56

- b. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan (pasal 49)
- c. Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham
- d. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dan klasifikasi tersebut. (pasal 54)

3. Hak pemegang saham

- a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
- b. Ketentuan berlakunya ketentuan a setelah dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.
- c. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
- d. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:
 - 1. Perubahan anggaran dasar
 - 2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dan 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan
 - 3. Penggabungan, peleburan pengambilalihan, atau pemisahan

4. Klasifikasi saham

- a. Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham
- b. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama
- c. Klasifikasi saham terdiri dari:
 - a) saham dengan hak suara atau tanpa hak suara
 - b) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris
 - c) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain
 - d) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dan pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau non kumulatif

5. Pemindahan hak atas saham

- a. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak
- b. Akta pemindahan hak disampaikan secara tertulis kepada perseroan
- c. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus, dan memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. (Pasal 56)
- d. Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan atau penolakannya harus diberikan secara

tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal organ perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

UUPT pasal 52, menyatakan bahwa pemegang saham pada perseroan memiliki beberapa hak. Tidak samanya jumlah saham yang tanamkan oleh masing-masing perorangan mengakibatkan adanya perbedaan menjadi pemegang saham Mayoritas dan pemegang saham independen yang merupakan pemegang saham minoritas.

Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dari suatu perusahaan go publik diberikan dalam bentuk pemberian hak-hak hukum bagi pemegang saham minoritas yang pengaturannya termuat baik dalam UUPT maupun UUPM. Hak-hak yang diberikan terhadap pemegang saham dalam UUPT adalah:

a. *Personal Right* (Hak Personal)

Yaitu hak perserorangan yang dimiliki seseorang atas saham yang dimasukkan dalam perseroan tersebut antara lain setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, jika dirugikan tindakan perseroan, yang Dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau Komisaris

b. *Appraisal Right*

Appraisal right adalah hak pemegang saham minoritas untuk membela kepentingannya dalam rangka menilai harga saham. Hak ini diminta oleh

pemegang saham pada saat meminta kepada perseroan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, karena pemegang saham tersebut tidak menyetujui tindakan perusahaan yang merugikannya atau merugikan perusahaan itu sendiri.

c. *Pre-Emptive Right*

Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki dahulu atas saham yang ditawarkan.

d. *Derivative Right*

Derivative Right adalah hak pemegang saham minoritas untuk menggugat Direksi dan Dewan Komisaris yang mengatasnamakan perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk membela kepentingan perusahaan di pengadilan

e. *Inspection right*

Inspection right adalah hak untuk melakukan pemeriksaan dan mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap tindakan yang dicurigai melanggar yang dilakukan oleh direksi, dewan komisaris dan pemegang saham mayoritas.

C. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

Sejarah Pasar Modal Indonesia berawal pada tahun 1912 dengan Bursa Efek yang didirikan oleh Belanda di Batavia dengan nama *Vereniging Voor De Effecten*. Kemudian dilanjutkan dengan didirikannya Bursa di Surabaya dan Semarang pada tahun 1925. Namun akibat Perang Dunia II, semua bursa ditutup. Pada tahun 1950 diaktifkan kembali dan kembali di berhentikan pada tahun 1958. Pada tanggal 10 Agustus 1977 Pasar Modal kembali diaktifkan. Saham yang

pertama diperdagangkan adalah saham PT Semen Cibinong. Tahun 1995, mulai diberlakukan system JATS (Jakarta Automatic Trading System). Suatu sistem perdagangan di lantai bursa yang secara otomatis me-*match*-kan antara harga jual dan beli saham. Sebelum diberlakukannya sistem JATS, transaksi dilakukan secara manual. Misalnya dengan menggunakan “Papan Tulis” sebagai papan untuk memasukkan harga jual dan harga beli saham.

Perdagangan saham berubah menjadi *scripless trading* yaitu perdagangan saham tanpa warkat (bukti fisik kepemilikan saham). Lalu seiring dengan kemajuan teknologi, bursa kini menggunakan sistem *remote trading*, yaitu sistem perdagangan jarak jauh. Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada akhir 2007 dan pada awal 2008 berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia.

Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:

- a. Memperoleh Deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden.
- b. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar perusahaan (menguasai) perusahaan)
- c. Berdagang. Saham dijual harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya.

Dalam suatu Negara, pasar modal memiliki dua fungsi penting yakni sarana pendanaan dan sarana investasi bagi masyarakat. Secara umum, pasar modal berfungsi sebagai:

1. Sarana pembiayaan usaha
2. Sarana bagi peningkatan nilai perusahaan

3. Sarana peningkatan kekayaan bagi investor
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
5. Menekan tingginya tingkat bunga menuju "rate" yang reasonable

a. Pengertian dan pengaturan Pasar Modal Indonesia

Menurut Undang-Undang Pasar Modal yang selanjutnya disebut dengan UUPM, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995, dalam pasal 1 angka 13, Pasar Modal adalah : kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal merupakan tempat bertemunya penjual dana dan pembeli dana yang di pasar modal atau bursa tersebut diperantarai oleh para anggota bursa selaku pedagang perantara perdagangan efek untuk melakukan transaksi jual-beli.⁹

Sumber hukum yang menjadi landasan dan ruang lingkup kehidupan dari industri pasar modal adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Ketentuan ini mencabut keberlakuan Keppres Nomor 53 tahun 1990 Tentang Pasar Modal)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal

⁹ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Jakarta. Badan Penerbit Iblam, 2005, hlm1.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/ KMK.013/1993 tentang Pasar Modal
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/ KMK/010/1995 tentang Pemilikan Saham Efek atau Unit Penyertaan Reksa Dana Oleh Pemodal Asing
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/ KMK/. 010/1995 Tentang Pemilikan Saham Efek Oleh Pemodal Asing (Maksimal 85% dari Modal Disetor)
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 455/ KMK.01/ 1997 tanggal 4 September 1997 Tentang Pembelian Saham oleh Pemodal Asing Melalui Pasar Modal
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/ KMK.010/2003 Tanggal 17 juli 2003 Tentang Permodalan Perusahaan Efek
9. Seperangkat Peraturan Pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam Sejak tanggal 17 Januari 1996

b. Pihak –pihak yang terkait dalam Pasar Modal Indonesia

Beberapa pihak yang terkait dalam kegiatan pasar Moda Indonesia adalah:

1. Bursa Efek

Bursa efek adalah pihak yang menyediakan dan menyelenggarakan system dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan untuk memperdagangkan efek diantara emiten. Bursa efek diharapkan mampu menciptakan kondisi yang mendorong perusahaan efek berperan dalam pengembangan bursa, memberikan pelayanan yang sebaiknya serta menjaring investor berinvestasi di Pasar modal

2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga penyimpanan dan penyelesaian pada saat ini dijalankan oleh PT.Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikeluarkan izinnya oleh BAPEPAM. KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan tertentu.

3. Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP)

Lembaga kliring dan Penjamin pada dasarnya mempunyai peran yang merupakan kelanjutan dari Bursa Efek dalam rangka penyelesaian transaksi bursa. Fungsi ini dijalankan oleh PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI). Transaksi yang terjadi di Bursa Efek di kliringkan oleh LKP secara terus menerus sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban anggota bursa yang melakukan transaksi.

4. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah perusahaan yang mendapatkan izin dari BAPEPAM untuk melakukan kegiatan penjamin emisi, perantara pedagang efek, manajer investasi atau kegiatan lainnya.

5. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan.

6. Perusahaan Publik

Perusahaan Publik adalah perusahaan yang melakukan penawaran umum yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sebanyak Rp. 3.000.000.000,. (Tiga Milyar Rupiah)

7. Reksa Dana

Reksa dana wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

8. Investor

Investor adalah pihak yang menginvestasikan sahamnya pada kegiatan pasar modal. Investor terbagi atas dua, investor asing dan investor dalam negeri¹⁰

9. Biro Administrasi Efek

Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM, pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

10. Kustodian

Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya

11. Wali Amanat

¹⁰ Investor asing adalah investor yang menanamkan sahamnya yang mana pihak tersebut berasal dari luar negeri atau di luar Negara Indonesia, sedangkan investor dalam negeri adalah pihak investor yang berasal dari dalam Negara Indonesia

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Melakukan kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

12. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

13. Pemeringkat Efek

Tugas pemeringkat efek adalah menentukan peringkat efek dengan menggunakan symbol tertentu yang dapat memberikan gambaran mengenai kualitas investasi dari suatu efek yang dinilai berkaitan dengan *Default Risk*.

c. Instrumen Pasar Modal Indonesia

Beberapa instrument yang ada pada Pasar Modal Indonesia adalah:

1. Instrumen Utang

Instrument utang yang diperdagangkan dalam pada pasar modal Indonesia adalah obligasi. Obligasi adalah suatu instrumen yang dipakai sebagai alat pengakuan hutang atau surat hutang yang biasanya digunakan dalam jangka panjang. Biasanya di Indonesia obligasi bersifat unjuk dengan umur rata-rata lima tahun.¹¹

2. Instrumen Penyertaan

Instrument penyertaan yang dimaksud dalam Pasar Modal Indonesia adalah instrumen penyertaan modal yakni saham. Saham merupakan suatu tanda atau

¹¹ *Ibid.* 91

bukti keikutsertaan seseorang dalam modal perseroan dan menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap perseroan.

3. Instrumen Efek Lain

Instrumen efek lain yang terdapat dalam Pasar Modal Indonesia yang merupakan pengembangan dari instrumen efek utama adalah:

a. Indonesia Depository Receipt (IDR)

Indonesia Depository Receipt disebut juga dengan sertifikat penitipan efek Indonesia. Menurut Ketentuan BAPEPAM No. IX.A.10. Nomor : Kep-49/PM/1997 Indonesia Depository Receipt adalah:

efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapatkan persetujuan dari BAPEPAM

b. Efek Beragunan Aset

Efek Beragunan Aset adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif beragunan aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan yang berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari, pemberian kredit termasuk kredit kepemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit, arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut.

c. Indeks Saham

Indeks saham adalah instrumen efek lain yang biasa diperdagangkan pada lantai bursa yang mulai dilakukan sejak disetujuinya perdagangan indeks LQ45¹² pada bursa Efek Surabaya.

4. Instrumen Efek Derivative

a. Right

Right adalah instrument efek derivative berupa penerbitan surat kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang diterbitkan.

Dengan adanya right, pemegang saham lama berhak untuk didahulukan mendapatkan penawaran beli dari perusahaan secara proposional pada harga yang telah ditetapkan sebelumnya untuk jangka waktu pendek, tetapi pemilki right tidak mendapatkan deviden, karena ia bukan bukti kepemilikan

b. Warrant

Menurut UUPM pasal 1 angka 5, warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham tersebut pada harga 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek dimaksud terbit.

c. Option

Option adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

¹² Indeks LQ 45 adalah nilai kapitalisasi pasar dari 45 saham yang paling likuid dan memiliki nilai kapitalisasi yang besar hal itu merupakan indikator likuidasi. Indeks LQ 45, menggunakan 45 saham yang terpilih berdasarkan Likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan setiap enam bulan (setiap awal bulan Februari dan Agustus). Dengan demikian saham yang terdapat dalam indeks tersebut akan selalu berubah. (<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/indek-lq-45-definisi-kriteria-dan.html>)

Opsi memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli tidak hanya saham, tetapi juga aset keuangan yang telah ditentukan jumlah, harga dan waktunya.

d. Sekuritas Kredit

Sekuritas kredit salah satu jenis pengakuan hutang jangka menengah (biasanya 3 bulan) yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan.

d. Penawaran Umum di Pasar Modal

Proses penawaran umum pada Pasar Modal Indonesia terbagi dalam 3 tahap:

1. Tahap Pra-Emisi

- a. Perusahaan melakukan kajian mendalam terhadap keadaan keuangan, aset kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Dari legal audit diketahui jumlah aset dan status aset keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, utang perusahaan, piutang perusahaan.
- b. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. keputusan RUPS dijadikan landasan untuk melakukan penawaran umum.
- c. Perusahaan menentukan penjamin emisi. Profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk penawaran umum.

Profesi penunjang yang diperlukan adalah:

1. Akuntan Publik, untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir

2. Notaris, untuk membuat dokumen atas perubahan Anggaran dasar, perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan notulan rapat.
 3. Konsultan hukum, untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum
 - d. Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum
 - e. Perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek.
 - f. Perusahaan melakukan *public expose*
 - g. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam
 - h. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif pernyataan pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi, dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen.
2. Tahap Emisi
- a. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer
 - b. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer
 - c. Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer
 - d. Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder.
 - e. Perdagangan efek di pasar sekunder.
3. Tahap Setelah Emisi
- a. Kewajiban emiten untuk menyampaikan informasi laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan.

- b. Kewajiban emitan untuk menyampaikan informasi laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi .

Penawaran Umum Obligasi.

1. Proses Sebeleum Penawaran Umum

- a. Membuat rencana penawaran umum obligasi yang disetujui oleh dewan komisaris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar. Bila disertai penjaminan aktiva perusahaan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Menunjuk penjamin
- c. Menunjuk Notaris, Konsultan Hukum untuk membantu penyiapan dokumen Penawaran Umum obligasi
- d. Melakukan *public expose*
- e. Melakukan penandatanganan perjanjian- perjanjian penting. Antara lain:
 1. Perjanjian perwaliamanatan
 2. Perjanjian dengan agen pembayaran
 3. Surat Pengakuan Utang
 4. Perjaniian penjaminan
- f. Menyampaikan pernyataan pendaftaran ke Bapapem, kemudian Bapepam akan meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

2. Proses Penawaram Umum

Dengan pernyataan pendaftaran yang dinyatakan efektif, perusahaan dapat melakukan penawaran obligasi dilakukan oleh sindikasi penjamin dan agen

penjual. Penjatahan dilakukan jika pemesanan atas obligasi tercatat di bursa efek, maka obligasi ditawarkan dan diperdagangkan di pasar sekunder.

3. Proses Sesudah Penawaran Umum

Sesudah penawaran umum dilakukan, maka perusahaan berkewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, laporan tahunan dan tengah tahunan, laporan mengenai kejadian penting yang berkaitan.

e. Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal Indonesia

Transparansi dalam pasar modal indonesia berarti keharusan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk kepada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal/calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

UUPM pasal 80 ayat 1 menyebutkan pihak-pihak yang bisa dimintakan pertanggungjawaban sebagai *liable person* atas pernyataan pendaftaran adalah:

1. Pihak yang menandatangani pernyataan pendaftaran
2. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif
3. Penjamin pelaksana emisi efek

4. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam pernyataan pendaftaran. Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan.
2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary market level*). Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan secara berkala dan terus-menerus kepada Bapepam dan bursa.
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu.

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari *Good Corporate Governance* yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan pasar modal. Pedoman GCG ref 4.0 memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan waktu dan akurat informasi. Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkaladan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif.¹³

Prinsip wajib mengungkapkan informasi penting terakomodasi dalam:

¹³ Ivan Yustiavandana, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, PT Kencana Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 236

1. Keharusan melakukan transaksi secara jujur, benar, dan demi kepentingan semua pemegang saham dan larangan melakukan transaksi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu (peraturan BAPEPAM No. IX.E.1. tentang benturan kepentingan transaksi tertentu)
2. Kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada publik (peraturan BAPEPAM No. X.K.4 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum)
3. Keharusan menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa dan publik yang berkaitan dengan proses pengambilalihan (peraturan bapepam No.IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka)
4. Kewajiban pihak penawar untuk menyampaikan informasi kepada otoritas pasar modal, bursa dan publik sehubungan dengan upaya pembelian saham perusahaan terbuka (peraturan bapepam no.IX.F.1 tentang penawaran tender)
5. Prinsip kecepatan penyampaian informasi atau fakta material atau peristiwa yang mungkin berpengaruh kepada harga efek kepada publik (peraturan bapepam No.X.K.1. tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik)
6. Surat keputusan ketua bapepam No.S-456/PM/1991 perihal pembelian saham atau penyertaan pada perusahaan lain
7. Prinsip ketepatan waktu dan akurasi termaktub dalam peraturan bapepam No.VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan
8. Kewajiban menyampaikan laporan keuangan (peraturan bapepam No. X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan berkala)

9. Surat keputusan ketua bapepam No.s-298/PM/1993 perihal kewajiban menyampaikan laporan keuangan konsolidasi
10. Prinsip keseragaman informasi untuk rencana RUPS (peraturan bapepam No. IX.I.1 tentang rencana dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham)

Transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat penanam modal. Dari segi substansial, transparansi memungkinkan publik untuk mendapatkan akses informasi penting yang berkaitan dengan perusahaan. Suatu pasar modal dikatakan *fair* dan efisien apabila semua pemodal memperoleh informasi dalam waktu yang bersamaan disertai kualitas informasi yang sama. Dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan. Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai keterbukaan atau transparansi ini menjadikan para pemegang saham terlindungi secara hukum dari praktik manipulasi dalam perusahaan publik.

UUPM menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin transparansi. Pemberlakuan UUPM akan menjadi indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap akurat dan benar, sehingga calon penanam modal mampu mengambil keputusan karena didukung oleh informasi yang kuat.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam transaksi benturan kepentingan dalam pasar modal Indonesia

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terdapat di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, pasal 52. Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang tersebut setiap pemegang saham mempunyai hak sebanyak saham yang mereka tanamkan.

Dalam ketentuan UUPM, yang mengatur mengenai benturan transaksi kepentingan merupakan ketentuan yang memberikan penghormatan terhadap hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Ketentuan tersebut juga memperlihatkan berlakunya prinsip kesetaraan bagi pemegang saham dalam suatu perusahaan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk menentukan kebijakan perusahaan berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.

Pengaturan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan suatu sarana pembatas bagi pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham minoritas, direksi dan komisaris perusahaan agar mereka tidak semena-mena bersepakat melakukan transaksi tertentu yang memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Partisipasi aktif dari pemegang saham independen dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu transaksi

yang mengandung benturan kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan pemegang saham minoritas dan sekaligus mendidik mereka untuk mengetahui dan mengenal hak mereka.

Pengabaian hak-hak independen yang dilakukan oleh perusahaan go publik dalam suatu proses transaksi yang mengandung benturan kepentingan, memberikan kewenangan bagi Bapepam untuk memeriksa, melakukan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan go publik yang melakukan pelanggaran dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya benturan kepentingan ini.

Bagi perusahaan go publik, aturan mengenai Benturan transaksi kepentingan merupakan suatu rem atau batasan agar tidak mengambil keputusan yang hanya menguntungkan pemegang saham mayoritas, tapi juga harus mempertimbangkan pemegang saham independen Minoritas.

Pemegang saham pada suatu perusahaan harus mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang saham untuk melindungi kepentingan secara pro aktif. UUPT menyebutkan, Direksi dan Komisaris bertanggungjawab secara terbatas sepanjang masih dalam ruang lingkup wewenangnya. Namun pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan tersebut merupakan tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*) yang merupakan bertentangan dengan ketentuan, dan tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan.

UUPT dan UUPM dapat digunakan oleh pemegang saham independen untuk mengambil tindakan represif dengan mengajukan tuntutan secara perdata ke Pengadilan Negeri terhadap Direksi atau Komisaris yang lalai atau melakukan

tindakan yang merugikan perseroan (UUPT Pasl 85 Ayat 2 dan 3, Pasal 98 Ayat 2, dan UUPM pasal 111). UUPT menganut asas Direksi dan Komisaris tidak bisa berlindung di balik perseroan atas suatu kerugian, jika kerugian tersebut nyata-nyata merupakan keputusan Direksi dan Komisaris. Karena sebagai pengurus perusahaan, direksi mempunyai kekuasaan.

E. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pasar Modal

Tahun 1976 ketika pasar modal dihidupkan kembali dibentuklah BAPEPAM. Menurut Keppres No.52/1976, baepam bertugas:

1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui pasar modal apakah telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sehat serta baik
2. Menyelenggarakan bursa pasar modal yang efektif dan efisien
3. Terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal

Selain bertindak sebagai penyelenggara, baepam juga merupakan Pembina dan pengawas. Dualisme ini kemudian dihapus setelah dikeluarkannya keppres 53 tentang pasar modal dan SK menkeu No. 1548 tahun 1990 , sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada fungsi pengawasan dan pembinaan pasar modal. Dengan fungsi ini, baepam dapat mewujudkan tujuan penciptaan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Dengan tugas yang diemban tersebut baepam harus melakukan pengawasan agar praktik dan pelanggaran dalam kegiatan atau transaksi tertentu pada pasar

modal tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan penanam saham. Praktik ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki informasi yang belum diketahui oleh publik, seperti komisaris, direktur, pegawai perusahaan, perusahaan afiliasi dan pemegang saham lain.

Seiring dengan luasnya wewenang bapepam, bapepam seharusnya disejajarkan dengan gubernur bank sentral atau menteri keuangan dan berhak menjadi dewan moneter.¹⁴

Menurut pasal 5 UUPM No 8 tahun 1995, Bapepam memiliki wewenang:

- a. Memberi izin usaha kepada perusahaan efek, lembaga kliring dan penyimpanan dan penyelesaian, reksadana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek.
- b. Mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat
- c. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap semua emiten perusahaan public yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran
- e. Wewenang untuk memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UUPM
- f. Wewenang untuk membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu

¹⁴ E.A.Koetin, *pasar modal Indonesia, retrospeksi lima tahun swastanisasi BEJ*, pustaka sinar harapan, Jakarta, 1997, hlmn 93.

- g. Wewenang untuk menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat
- h. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang di kenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin.

Selain itu, dalam rangka sebagai pemeriksa, BAPEPAM mempunyai wewenang antara lain:

- a. Meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu
- b. Mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan aturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak suatu kegiatan tertentu
- c. Memeriksa dan atau membuat salinan terhadap salinan terhadap catatan, pembukuan dan atau dokumen lain, baik milik pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik pihak lain apabila dianggap perlu
- d. Menetapkan syarat dan atau mengizinkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UUPT dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.
- e. Menghentikan kegiatan perdagangan di bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat

- f. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal
- g. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas UUPM dan peraturan pelaksanaannya.





BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi dalam Pasar Modal Indonesia

Pemegang saham minoritas merupakan golongan yang sering diabaikan haknya oleh pemegang saham mayoritas, hal ini disebabkan oleh jumlah saham yang mereka tanamkan dan kekuasaan yang mereka miliki tidak sama dengan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham minoritas / independen adalah pemegang saham yang memiliki kurang dari 25% (duapuluh lima perseratus) saham perusahaan atau pemegang saham yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan karena kepemilikannya kurang dari 25 %.¹⁵

Ada beberapa unsur yang ditemukan dalam benturan kepentingan transaksi tertentu yakni:

1. Emiten atau perusahaan publik
2. Benturan kepentingan Transaksi tertentu
3. Harus disetujui pemegang saham independen¹⁶

Beberapa hal yang mendorong terjadinya benturan kepentingan transaksi adalah:

1. Kepentingan diri sendiri

¹⁵ Heriyadi indrakusuma, *Tinjauan Hukum atas efektivitas perlindungan kepada pemegang saham minoritas/independen pada transaksi benturan kepentingan*,thesis, 2006, hlm 14.

¹⁶ Ivan yustivianda, *aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*,kencana indra pratama, hlm 249

Transaksi yang dilakukan memiliki kecenderungan untuk menguntungkan diri sendiri sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagai pihak yang mengatur dan mengontrol jalannya transaksi, maka membuat potensi untuk menguntungkan diri sendiri besar. Pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan secara langsung akan mengalami kerugian, yakni kerugian yang berpengaruh terhadap perusahaan publik hingga menurunkan keuntungan bersih yang nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden.

2. Kompensasi bagi pengurus/ manajemen

Kebanyakan perusahaan publik memberikan kompensasi berbentuk saham kepada jajaran manajemen atau eksekutifnya yang biasanya dengan program pemberian saham kepada karyawan atau *employee/ management stock option plan*. Kondisi ini berpotensi menguntungkan pihak manajemen karena dengan kemampuannya untuk mempengaruhi perusahaan. Pihak manajemen dapat dengan mudah menentukan dan melaksanakan haknya untuk membeli saham perseroan melalui program *employee/Management stock option plan* yang disetujui oleh pemegang saham. Hal ini tidak *fair* bagi pemegang saham lain karena biasanya dijual dengan harga yang lebih murah daripada dipasaran

3. Pengambilalihan asset perseroan

Kemampuan mengendalikan perusahaan dan penempatan pihak yang dapat mewakili kepentingannya dalam perusahaan berpotensi menjadikan benturan kepentingan transaksi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara rekayasa transaksi seolah-olah menguntungkan perusahaan dalam jangka panjang dan memungkinkan pengambilalihan asset perusahaan oleh pihak pengendali

4. Tindakan korporasi dengan beberapa motivasi

Manajemen perusahaan publik biasanya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian kembali saham perseroan dari pihak dari pihak yang menyatakan akan menjadi pengendali baru dari perusahaan publik. konsekuensinya dengan masuknya perusahaan baru memungkinkan terjadinya pergantian manajemen. Untuk melindungi kepentingannya, dapat memutuskan untuk membeli dengan harga yang premium, menjadikan perusahaan lain tidak jadi membeli saham tersebut dan posisi manajemen akan terjaga, namun kegiatan ini akan merugikan perusahaan Karena perusahaan kehilangan kesempatan untuk berinvestasi dibidang lain.

Clark dan Kinder berpendapat bahwa pemberian persetujuan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan hak pemegang saham. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Karena bila saja transaksi itu malah menimbulkan kerugian, maka deviden mereka akan berkurang, sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan perusahaan.¹⁷

UUPM pasal 82 ayat 2 jo. Peraturan BAPEPAM No. IX.E.1.yang telah diperbaharui dengan keputusan No.kep-412/BL/2009 merupakan bentuk perlindungan dari dua sisi. Pertama, BAPEPAM mempunyai kapasitas untuk menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu. Penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan tertentu

¹⁷Ivan, *ibid*, hal 251

merupakan tindakan represif. Artinya, perbuatan telah terjadi memungkinkan kerugian pun telah dialami. Sedangkan penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen di dalam proses pengambilan keputusan merupakan sarana hukum untuk mencegah terjadi transaksi benturan kepentingan tertentu yang biasa menguntungkan pihak-pihak tertentu sekaligus merugikan perseroan. Penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen merupakan sarana preventif, tindakan preventif jauh lebih baik.¹⁸

Dalam hal perlindungan bagi pemegang saham minoritas, para pemegang saham perlu memahami hak dan menggunakannya untuk melindungi kepentingan secara proaktif. UUPT memang menyebutkan direksi dan juga komisaris bertanggung jawab secara terbatas sepanjang tindakan tersebut berada dalam wewenangnya (*intra vires*). Namun, pertanggungjawaban dapat dimintakan kepada pengurus jika tindakan pengurus tersebut merupakan tindakan diluar kewenangnya (*ultra vires*) yang merupakan bertentangan dengan ketentuan, dan tindakan itu menimbulkan kerugian bagi perseroan.

Pengaturan mengenai benturan transaksi kepentingan merupakan perlindungan bagi pihak yang dianggap lemah dari kemungkinan adanya penetapan harga yang tidak wajar atas transaksi yang dilakukan oleh emiten karena adanya benturan kepentingan. Pada dasarnya semua transaksi yang dilakukan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham minoritas/ independen.

¹⁸ Ivan, *ibid*, hal 252.

UUPT dan UUPM dapat digunakan oleh pemegang saham independen untuk mengambil tindakan represif dengan mengajukan tuntutan secara perdata ke pengadilan negeri terhadap direksi atau komisaris yang lalai atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan (UUPT Pasal 85 Ayat 2 dan 3 , Pasal 98 Ayat 2, dan UUPM Pasal 111). UUPT menganut asas direksi dan komisaris tidak bisa berlindung di balik perseroan atas suatu kerugian, jika kerugian tersebut nyata-nyata merupakan keputusan Direksi dan komisaris. Karena sebagai pengurus perusahaan, direksi mempunyai kekuasaan. Dengan kekuasaannya yang sangat besar itu ada kemungkinan akan merugikan perseroan yang pada akhirnya dalam hal ini akan merugikan pemegang saham sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap PT.

Dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh direksi atau komisaris berkenaan dengan benturan kepentingan transaksi tertentu sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka berdasarkan Pasal 85 Ayat 3 UUPT memberikan hak derivative kepada pemegang saham minoritas yang paling sedikit memiliki saham sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham, yaitu hak untuk dapat mengajukan gugatan atas nama perseroan ke pengadilan negeri terhadap direksi dan komisaris yang melakukan kelalaian dan kesalahan tadi.

Selain itu apabila direksi dan komisaris telah lalai meminta persetujuan pemegang saham dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham mengenai transaksi yang mengandung transaksi benturan kepentingan maka pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari seluruh jumlah pemegang saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan

pengadilan negeri agar diberi kewenangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk membahas mengenai persetujuan dalam rangka transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hak untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham ini termasuk pula sebagai hak *derivative*. (Pasal 66 Ayat (2) dan Pasal 67 Ayat (1) UUPT.

Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas adalah meminta pemeriksaan terhadap perseroan jika terdapat dugaan bahwa direksi atau komisaris telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan pemegang saham atau pihak ketiga yang berkaitan dengan dilaksanakannya suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu. Hak untuk meminta dilakukannya pemeriksaan terhadap perseroan ini disebut juga hak pemeriksaan atau *inspection right* (pasal 110 UUPT) .

Pemegang saham dapat segera Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengganti direksi dan komisaris apabila ternyata setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bahwa direksi atau komisaris bersalah atau lalai berkenaan dengan perbuatan direksi atau komisaris yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang merugikan perseroan atau dapat pula pemegang saham meminta ganti rugi kepada direksi dan komisaris berkenaan dengan kerugian yang diderita oleh perseroan sehubungan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan (Pasal 85 ayat (2) dan (3), Pasal 98 Ayat (2) UUPT, pasal 110 UUPM.

Dalam hal lain pemegang saham minoritas atau independen dapat melalui hak derivative meminta kepada pengadilan negeri untuk membubarkan perseroan disertai dengan alasan yang kuat dan jelas.

2. Peranan BAPEPAM Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Dalam Pasar Modal Indonesia

Dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi dalam pasar modal Indonesia BAPEPAM mempunyai peran yang cukup besar, ini terlihat dari dikeluarkannya peraturan khusus dari BAPEPAM tentang benturan kepentingan transaksi tertentu, yakni peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1.Tahun 2009. peraturan yang dibuat oleh BAPEPAM ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari UUPM pasal 82 ayat 2 yang berbunyi:

BAPEPAM dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik

Dari sisi lain, keseriusan BAPEPAM dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam benturan kepentingan transaksi tertentu dapat kita lihat dari beberapa kalinya dilakukan revisi peraturan No.IX.E. tahun 1996.

1. Revisi pada tanggal 22 agustus 2000, dengan keputusan No. Kep-32/PM/2000.

Penyempurnaan peraturan ini antara lain dimaksudkan untuk memperluas pengertian Benturan Kepentingan dan pengertian Pemegang Saham Independen.

Adapun pokok-pokok penyempurnaan pada Peraturan Nomor IX.E.1 adalah:

- a. Perubahan definisi Benturan Kepentingan sehingga Benturan Kepentingan tidak hanya meliputi perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan namun termasuk juga perbedaan kepentingan ekonomis Perusahaan dengan Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utamanya.
- b. Perubahan mengenai definisi Pemegang Saham Independen, sehingga Pemegang Saham Independen tidak hanya meliputi pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu, namun termasuk pula pemegang saham yang bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan.
- c. Dalam rangka proses pemulihan ekonomi nasional, maka dipandang perlu untuk mengecualikan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

2. Revisi pada tanggal 12 Desember 2008 dengan keputusan No.521/ BL/ 2008
3. Revisi pada tanggal 25 November 2009 dengan keputusan No.412/BL/2009

Beberapa pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menyempurnakan definisi Benturan Kepentingan, sehingga Benturan Kepentingan adalah *“Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud”*.

b. Memperluas cakupan mengenai definisi Transaksi Afiliasi, sehingga Transaksi Afiliasi adalah *“Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan”*.

c. Menambah beberapa jenis Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang dikecualikan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Peraturan ini.

Dalam hal ini BAPEPAM selaku otoritas pasar modal berwenang mengenakan sanksi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yaitu direksi dan

komisaris. Tindakan BAPEPAM yang meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal. Dengan begitu pengurus perseroan tidak dapat mengelak tanggung jawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada perseroan. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari pengurus perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan perseroan.

Untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi benturan kepentingan terhadap pemegang saham minoritas, BAPEPAM mewajibkan emiten atau perusahaan publik meminta persetujuan pemegang saham independen atau pemegang saham minoritas apabila emiten atau perusahaan publik berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris dan pemegang saham utama emiten atau perusahaan.

Ada beberapa modus transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu:

1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha atau pembentukan usaha patungan
2. Perolehan kontrak penting
3. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material
4. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain

5. Memberi pinjaman kepada perusahaan lain dimana direktur, komisaris, pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direksi atau dewan komisaris.
6. Memperoleh pinjaman dari perusahaan lain dimana direktur, komisaris dan pemegang saham utama merupakan pemegang saham, direktur, dan komisaris
7. Melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris
8. Mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utama, komisaris, atau direksi dari perusahaan publik atau emiten
9. Memakai jasa perusahaan dimana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur atau komisaris
10. Membeli saham perusahaan lain dimana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi menjadi pemegang saham atau anggota direksi atau komisaris
11. Menggunakan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, direksi, atau komisaris menjadi pemegang saham, komisaris atau direksi pula pada perusahaan yang menerima penyertaan.
12. Perusahaan menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi ataupun bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama,

direksi, atau komisaris menjadi pemegang saham atau menjadi anggota komisaris atau direksi dari perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut.

13. Perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik.

Perusahaan publik menggunakan fasilitas perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direksi atau komisaris dari pemberi fasilitas

14. Transaksi lain yang berindikasi adanya benturan kepentingan

Menurut ketentuan BAPEPAM No. IX.E.1 tahun 2009 pada ketentuan ke tiga

(3) Beberapa transaksi yang tidak tergolong / dikecualikan dalam transaksi benturan kepentingan tertentu adalah:

1. Transaksi antara perusahaan terkendali yang dimiliki sekurang-kurangnya 99% perusahaan yang dimaksud
2. Transaksi antara perusahaan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya tidak dimiliki seluruhnya atau tidak satupun saham perusahaan terkendali dimiliki oleh komisaris, direksi pemegang saham utama perusahaan yang dimaksud dan afliasinya apabila kepemilikan saham perusahaan terkendali melebihi 50%
3. Transaksi yang melibatkan perusahaan atau perusahaan terkendali dengan pihak terafiliasi jika hubungan dan jenis transaksi yang sudah ada sebelum perusahaan melakukan penawaran umum dan hal tersebut sebelumnya telah diungkapkan dalam *prospectus*
4. Transaksi perusahaan dengan karyawan, direksi atau komisaris perusahaan maupun dengan karyawan, direksi, atau komisaris perusahaan terkendali dan

transaksi antara perusahaan terkendali dengan karyawan, direksi atau komisaris perusahaan maupun dengan karyawan, direksi atau komisaris perusahaan yang dilakukan dengan persyaratan yang sama sepanjang diungkapkan

5. Pemberian fasilitas perusahaan kepada karyawan, direksi atau komisaris yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap perusahaan sesuai dengan ketentuan BAPEPAM
6. Imbalan termasuk gaji dan bonus khusus
7. Pembelian tanah atau bangunan yang tidak melebihi Rp.5.000.000.000 atau 0,5 % dari kekayaan bersih perusahaan sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit
8. Transaksi yang dilakukan oleh badan penyehatan perbankan nasional yang dilakukan untuk kegiatan restruktur perekonomian¹⁹

Pada umumnya pemegang saham independen merupakan pemegang saham minoritas yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan BAPEPAM Nomor IX.E.1.tahun 2009. Disini BAPEPAM mempunyai fungsi sebagai pemberi koridor yang akan membatasi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dan dewan komisaris perseroan untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan hak-hak pemegang saham minoritas.

¹⁹ *Ibid*, hlm.47

Dalam hal lain, terhadap pelanggaran yang terjadi, BAPEPAM merupakan lembaga yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang dianggap melakukan pelanggaran tersebut. UUPM pasal 102 jo. PP Nomor 45 tahun 1995 pasal 56 merupakan landasan bagi BAPEPAM Untuk menjatuhkan sanksi bagi pelanggar.

3. Tanggung Jawab Pengurus (Direksi dan Komisaris) Terhadap Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Dalam Pasar Modal Indonesia.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan kepentingan ekonomis antara perusahaan di satu pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham di lain pihak. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya.

Dengan kekuasaannya direksi atau komisaris dapat menganbil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Untuk itu BAPEPAM mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham independen. Jika transaksi tersebut dilakukan tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka tindakan direksi dan komisaris dianggap sebagai tindakan diluar kewenangannya (*ultra vires*). Dengan demikian, tindakan direksi dan komisaris bertentangan dengan UUPT Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 98.

Kedudukan seorang direksi atau komisaris sebagai pemegang *fiduciary duties* dari pemegang saham perseroan bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya sesuai dengan itikad

baik dan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar perseroan. Dalam hal mengatasi terjadinya benturan kepentingan diperlukan pengaturan-pengaturan hukum mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu, seharusnya baik direksi maupun komisaris harus mentaati dan patuh terhadap peraturan termasuk prinsip-prinsip *good corporate governance*

Direksi dan komisaris dalam hal ini merupakan pengurus perseroan, juga mempunyai tanggung jawab dalam benturan kepentingan transaksi yang terjadi dalam perseroan. Direksi adalah organ kepercayaan perseroan yang wajib menjalankan tugas tersebut, dengan berpegang teguh pada kepercayaan yang diterimanya (*fiduciary duty*). Dengan konsep tersebut, maka direksi dalam tugas kepengurusan wajib senantiasa bertindak atas dasar itikad baik, bertindak dengan sungguh-sungguh sesuai keahliannya, mengutamakan kepentingan perseroan, bukan kepentingan pemegang saham semata-mata dan menjaga diri agar terhindar dari tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara perseroan dan direksi.

Setiap penyimpangan atau pelanggaran atas tugas dan kewajiban direksi akan menimbulkan pertanggungjawaban direksi sampai kepada harta benda kekayaan pribadi atas kerugian yang dialami oleh tiap-tiap pihak yang berkepentingan . pelanggaran dan penyimpangan tersebut antara lain:

1. Tidak menjalankan tugasnya secara professional sesuai dengan keahlian yang dimiliki, seperti:
 - a. Secara sengaja atau tidak melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (*breach of duty*)

- b. Sengaja atau tidak melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (*omission of duty*)
 - c. Sengaja atau tidak memberikan pernyataan yang menyesatkan (*misleading of statement*)
 - d. Sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (*breach of warranty or authority commitment*)
2. Tidak menjalankan tugasnya sebagai pemegang saham yang baik, yang dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran (*breach of trust*), kelalaian, dan kesahan.

Batas tanggung jawab pemegang saham atas kerugian perseroan hanyalah sebatas jumlah saham yang dimiliki. Demikian juga tanggung jawab anggota direksi hanyalah sebatas pengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum. Akan tetapi asas pertanggungjawaban tidak berlaku ketika terjadi pelanggaran yang didalam doktrin hukum dikenal dengan nama *Piercing The Corporate Veil*.

Istilah *Piercing The Corporate Veil* berarti membuka tirai perseroan dimana kekebalan yang biasa dimiliki oleh pemegang saham, direksi dan komisaris, yaitu tanggung jawabnya terbatas dibuka dan diterobos menjadi tanggung jawab tidak terbatas, hingga kekayaan pribadi manakala terjadi pelanggaran, penyimpangan atau kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan.

Ketentuan *fiduciary duty* dalam UU Perseroan Terbatas yang bila dilanggar berakibat pada keberlakuan *piercing the corporate veil* terdapat pada pasal 85 ayat 1 dan ayat 2 yang pada intinya menyatakan: setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab sampai kekayaan pribadinya, apabila yang bersangkutan

bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha perseroan

Suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat dilaksanakan apabila mendapat persetujuan dari pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila Direksi atau komisaris yang melakukan tindakan yang mengandung benturan kepentingan transaksi tertentu maka gugatan diajukan pemegang saham dengan: gugatan langsung (*direct Suit*) dan Direksi yang melanggar ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan jika dilihat dari *duty of care* yang diembannya, maka Direksi dianggap telah melanggar *duty of care* yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan yang dipimpinnya.

Ketentuan dalam KUHPdata pasal 1365 menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan ketentuan tadi, maka pengurus harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada perusahaan. Hal ini disebabkan karena direktur melakukan tindakan kesalahan dan kelalaian.

Pihak yang menyebabkan terjadinya transaksi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. BAPEPAM hanya berwenang mengenakan sanksi kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pihak tersebut adalah direksi dan komisaris perusahaan. Sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi peringatan tertulis dan denda.

Tindakan BAPEPAM meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pengurus (direksi dan komisaris) mengacu kepada UUPT Pasal 85 Ayat 2 jo. UUPM Pasal 102 Ayat 1. Dengan begitu pengurus perseroan tidak dapat mengelakkan tanggungjawabnya dan mengalihkan tanggung jawab kepada perseroan. Karena UUPT memberikan kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari pegurus perseroan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan perseroan. Demikian juga pasal 90 ayat 2 UUPT yang menyatakan, dalam hal terjadi kepailitan karena kelalaian atau kesalahan direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diangkat dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan dari pembahasan “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Benturan Kepentingan Transaksi Pada Pasar Modal Indonesia” yaitu antara lain:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan UUPM dan UPT terdiri dari dua bagian, yang pertama perlindungan represif, yaitu adanya ketentuan yang dibuat oleh BAPEPAM yang berkaitan dengan benturan transaksi kepentingan dan adanya penegakkan hukum bagi pelanggaran terhadap pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan benturan kepentingan transaksi. Yang kedua adalah perlindungan hukum preventif yakni adanya penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemegang saham independen .
2. BAPEPAM mempunyai fungsi sebagai badan pembuat ketentuan dan yang menjatuhkan sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran yang berkaitan kegiatan benturan transaksi kepentingan. BAPEPAM juga membuat suatu peraturan khusus mengenai benturan transaksi kepentingan ini yaitu peraturan Nomor IX.E.1 tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari ketentuan UUPM Pasal 82 ayat (2).
3. Tanggung jawab perseroan dan pengurus atas benturan kepentingan transaksi tertentu didasarkan kepada UUPT pasal 85 Ayat 2 jo. UUPM pasal 102 Ayat

1. Berdasarkan ketentuan ini, pengurus juga harus bertanggung jawab terhadap terjadinya benturan kepentingan transaksi dan tidak dapat mengelak memberikan atau mengalihkan tanggung jawab tersebut semata-mata hanya kepada perseroan saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang penulis lakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan UUPT dan UUPM kurang rinci, maka hendaknya perlindungan hukum yang diberikan lebih rinci lagi sehingga memudahkan pihak-pihak yang memerlukan peraturan tersebut untuk memahaminya, sehingga para penegang saham minoritas benar-benar mendapatkan perlindungan
2. Hendaknya BAPEPAM sebagai badan yang membuat peraturan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap benturan kepentingan transaksi dapat membuat peraturan yang membuat para pihak tidak melakukan pelanggaran terhadap benturan kepentingan transaksi tertentu, dan dapat menghormati para pemegang saham minoritas.
3. Sebaiknya BAPEPAM bekerjasama dengan perusahaan untuk dapat memberikan suatu pemahaman mengenai hak dan kewajiban daripada pemegang saham suatu perseroan, sehingga dengan adanya pembelajaran tersebut diharapkan para pemegang saham dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Peraturan BAPEPAM Nomor IX.E.1. Tentang Benturan Kepentingan Transaksi

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

INTERNET

<http://abdurachim.com>, diakses 11 September 2010

<http://prasetya-online.com>, diakses 11 September 2010

Aditya pratomo, "*Analisis Yuridis Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas*", diakses pada 15 September 2010 dari <http://www.google.com>.

Bangun Wijayanti, "*Perlindungan Bagi Pemegang saham Minoritas Atas Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Go Publik*", di akses pada 28 Desember 2010, Jam 10.57 dari <http://www.google.com>

Heryadi Indrakusuma, "*Tinjaun Hukum Atas Efektivitas Perlindungan Kepada Pemegang Saham Minoritas/ Independen Pada Transaksi Benturan Kepentingan*", diakses pada 28 Desember 2010 pada Jam 11.00 dari <http://www.google.com>

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- E.A.Koetin, *Pasar Modal Indonesia (restropeksi Lima tahun Swastanisasi BEJ)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- I.G.Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet VI, Kesaint Blanc, Jakarta, 2006.
- I.G.Ray Wijaya, *Hukum Perusahaan Terbata*, Megapoin, Jakarta, 2006.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet 1, kencana Prenada Media Grup, 2004.
- Iman Sjahputra Tunggal, *Aspek Hukum Aspek Pasar Modal Indpnesia (konsep dan kasus)*, harvarindo. 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Buku Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Cet IV, Alumni, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma, dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*. Badan Penerbit Iblam, Jakarta.2005

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-32/PM/2000
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada pemegang saham, khususnya pemegang saham independen, berkaitan dengan transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, serta peraturan tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1997 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.E.1 TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-12/PM/1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal



LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

PERATURAN NOMOR IX.E.1 : BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU

1. DEFINISI

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.
- c. Transaksi adalah aktivitas atau kontrak dalam rangka memberikan dan atau mendapat pinjaman, memperoleh, melepaskan atau menggunakan aktiva, jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali atau mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas tersebut.
- d. Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Perusahaan atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama.
- e. Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan atau bukan merupakan Pihak Terafiliasi dari direktur, komisaris atau Pemegang Saham Utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas transaksi tertentu.
- f. Karyawan adalah semua tenaga kerja yang menerima upah dan atau gaji dari Perusahaan.

2. TRANSAKSI YANG MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN

Jika suatu Transaksi dimana seorang direktur, komisaris, pemegang saham utama atau Pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama mempunyai Benturan Kepentingan, maka Transaksi dimaksud terlebih dahulu harus disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

3. TRANSAKSI YANG DIKECUALIKAN

Transaksi yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 2 peraturan ini, adalah :

- a. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% (sembilan puluh sembilan per seratus) oleh Perusahaan dimaksud, jika laporan keuangan dari Perusahaan tersebut dikonsolidasikan;
- b. Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya tidak dimiliki seluruhnya dan tidak satu pun saham atau modal Perusahaan Terkendali dimiliki oleh komisaris, direktur, pemegang saham utama Perusahaan dimaksud, atau Pihak Terafiliasinya. Apabila pemilikan saham pada Perusahaan Terkendali tersebut melebihi 50% (lima puluh perseratus), maka laporan keuangannya harus dikonsolidasikan;
- c. Transaksi yang melibatkan Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Pihak Terafiliasi, jika:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, diubah dengan

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, diubah dengan

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

- 1) hubungan dan jenis Transaksi sudah ada sebelum Perusahaan dimaksud mengadakan Penawaran Umum dan hubungan ini serta sifat hubungan yang berlanjut, telah diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus penawaran perdana tersebut; atau
- 2) hubungan dan jenis Transaksi yang dimulai sesudah Penawaran Umum, yang telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- d. Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali, dan Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, direksi atau komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan semua Karyawan. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, direksi atau komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijaksanaan yang ditetapkan Perusahaan tersebut sebagaimana diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham, dan semua Karyawan;
- e. penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada komisaris, direktur, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan yang langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap Perusahaan tersebut dan sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang disampaikan kepada Bapepam sebagai informasi kepada masyarakat;
- f. imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan atau manfaat khusus yang diberikan kepada komisaris, direktur dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala; dan
- g. pembelian tanah dan atau bangunan rumah tinggal dari seorang komisaris, direktur, dan pemegang saham utama, atau setiap Pihak yang mereka ketahui terafiliasi dengan perusahaan pada saat itu dalam jumlah tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau kurang dari 0,5% (nol koma lima perseratus) dari nilai kekayaan bersih Perusahaan, sesuai dengan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh Akuntan. Pembelian dimaksud harus sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan yang berlaku bagi semua Karyawan dan telah diungkapkan kepada Bapepam, para pemegang saham dan Karyawan. Pembelian dimana terdapat Benturan Kepentingan dan yang jumlahnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) wajib dinilai oleh Penilai Independen.
- h. transaksi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional.

4. PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui suatu Transaksi yang tidak dikecualikan oleh angka 3 peraturan ini, harus meliputi informasi yang diatur dalam angka 6 peraturan ini dan diumumkan sebagaimana diatur dalam angka 11 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, **diubah dengan**

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, **diubah dengan**

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

5. LAPORAN TENTANG PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Salinan pemberitahuan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 peraturan ini harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.

6. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Informasi yang harus diungkapkan sebagaimana diatur dalam angka 4 peraturan ini meliputi:

a. uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya :

- 1) kekayaan atau jasa yang bersangkutan;
- 2) nilai Transaksi yang bersangkutan;
- 3) nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
- 4) sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut;

b. ringkasan laporan Pihak independen yang ditunjuk;

c. tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan rapat pemegang saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika korum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini;

d. penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan;

f. rencana Perusahaan, data Perusahaan dan informasi lain yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam angka 7 peraturan ini;

g. pernyataan komisaris dan direktur yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan

h. ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam.

7. TRANSAKSI MATERIAL, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ATAU PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal Transaksi Material, Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Pengambilalihan Perusahaan Terbuka terdapat Benturan Kepentingan, maka Perusahaan tersebut disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 6 peraturan ini juga harus memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama atau Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-84/PM/1996

Tanggal : 24 Januari 1996, **diubah dengan**

Nomor : Kep- 12/PM/1997

Tanggal : 30 April 1997, **diubah dengan**

Nomor : Kep-32/PM/2000

Tanggal : 22 Agustus 2000

8. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

Sebelum Rapat Umum Pemegang Saham, Perusahaan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani Pemegang Saham Independen yang sekurang-kurangnya menyatakan bahwa :

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
- b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERTAMA DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KEDUA

Suatu Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan dapat dilakukan jika telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal korum rapat tidak terpenuhi, maka rapat kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan Transaksi dimaksud disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. Dalam hal korum untuk rapat kedua juga belum terpenuhi, rapat ketiga dapat mengambil keputusan setelah dipenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam angka 10 peraturan ini.

Pemberian suara dari Pemegang Saham Independen dapat dilakukan langsung oleh Pemegang Saham Independen atau wakil yang diberi kuasa.

10. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM KETIGA

Rapat ketiga hanya dapat diadakan setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam. Persetujuan dimaksud didasarkan atas pertimbangan bahwa penyelenggaraan rapat sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengumuman kepada masyarakat telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam angka 11 peraturan ini; dan
- b. tempat rapat dan prosedur pemberian kuasa telah dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Independen.

Rapat ketiga hanya dapat menyetujui Transaksi dimaksud apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh perseratus) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.

11. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPEROLEH PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jika suatu Transaksi yang diwajibkan memperoleh persetujuan sebagaimana disyaratkan dalam angka 2 peraturan ini tidak memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-84/PM/1996
Tanggal : 24 Januari 1996, **diubah dengan**
Nomor : Kep- 12/PM/1997
Tanggal : 30 April 1997, **diubah dengan**
Nomor : Kep-32/PM/2000
Tanggal : 22 Agustus 2000

dalam rapat yang telah mencapai korum kehadiran sebagaimana diatur dalam angka 9 peraturan ini, maka rencana Transaksi dimaksud tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

12. PENGUMUMAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pengumuman dan panggilan rapat yang disyaratkan untuk rapat-rapat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pengumuman mengenai pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham harus diterbitkan sekurang-kurangnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum rapat dan pemberitahuan dimaksud harus memuat informasi yang disyaratkan oleh angka 6 peraturan ini. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sekurang-kurangnya 14 (empat

belas) hari sebelum rapat dimaksud. Panggilan harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau faksimili ke alamat pemegang saham disamping panggilan yang diterbitkan melalui surat kabar. Panggilan dimaksud harus disertai dengan informasi yang disyaratkan dalam angka 6 peraturan ini; dan

- b. untuk rapat kedua dan ketiga, masing-masing panggilan dimaksud harus diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan menyebutkan telah diselenggarakannya RUPS pertama tetapi tidak mencapai korum. Panggilan kepada Pemegang Saham Independen yang tidak hadir dalam rapat terdahulu harus dikirimkan melalui surat pos tercatat atau faksimili sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat.

13. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadi pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Agustus 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750